

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Doly Afandi Sadewo *

Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D**

Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**

Oknum anggota Kompi Brimobdasu yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang tugas dan kewenangan Propam Polri terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana, bagaimana mekanisme penindakan Propam Polri terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana, bagaimana kendala dan upaya Propam Polri dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana,

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hambatan di dalam penerapan penindakan terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh Propam adalah lemahnya mentalitas dan tidak adanya inisiatif aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya yang ditempuh Propam Polri terhadap anggota polisi yang melakukan penganiayaan dengan cara memaksimalkan mentalitas kinerja Propam Polri dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri. Disarankan agar peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi.

Kata Kunci: Kode Etik, Brimob, Tindak Pidana.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CODE OF ETHICS SANCTIONS ON BRIMOB MEMBERS WHO COMMIT POLICY ETHICS VIOLATIONS (Research Study in the Field of Regional Police Profession and Security North Sumatra)

Doly Afandi Sadewo *
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D**
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**

Individual members of the Brimobdasu Company who commit criminal acts have violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the National Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation and dignity of the National Police of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in this research is how to regulate the duties and authority of Propam Polri towards police officers who commit criminal acts, what is the mechanism for taking action against police officers who commit criminal acts, what are the obstacles and efforts of Propam Polri in taking action against police officers who commit crimes? criminal,

This research is descriptive analytical research that leads to empirical juridical research. The data sources in this research are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the North Sumatra Regional Police. Data collection tools are library research and field research.

Propam's action against police who commit criminal acts is regulated in Government Regulation Number 1 of 2003 concerning the Dismissal of Police Members and National Police Chief Regulation No. Pol.: 7 of 2006 concerning the Police Professional Code of Ethics, the mechanism for handling which is through the Police Code of Ethics Commission hearing. Actions by Propam against Polri members who carry out abuse are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code by remembering, paying attention to and being guided by the provisions that regulate specifically for suspected Polri members.

Based on the research results, it is known that the obstacles in implementing action against members of the National Police carried out by Propam are weak mentality and the lack of initiative by law enforcement officers resulting in law enforcement not running as it should. The efforts taken by Propam Polri against members of the police who commit abuse are by maximizing the performance mentality of Propam Polri in enforcing disciplinary laws for members of the Police. It is recommended that in order for the regulations of the National Police Professional Code of Ethics to be implemented properly, the National Police should further improve performance monitoring of its members by means of, for example, providing guidance in accordance with the profession.

Keywords: Code of Ethics, Brimob, Crime.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*